



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	A-1&7
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 (27) 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SUKSES KELOLA KEUANGAN DAERAH

Pemko Payakumbuh Diganjar WTP Lima Kali Berturut-turut



Walikota Payakumbuh Riza Falepi.

PAYAKUMBUH - Luar biasa prestasi Pemko dibawah kepemimpinan Riza Falepi, yang kembali mendapatkan penghargaan. Kali ini merupakan plakat penghargaan Entitas Pelaporan (EP) Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut, mulai dari 2016-2020 dan piagam kepada EP yang meraih

Bersambung ke Hlm A-7

Pemko Payakumbuh...

WTP pada tahun 2020.

Penghargaan dari Kementerian Keuangan itu, dijemput lang. ung oleh Asisten III Setdako Amriul Dt. Karayiang dan diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, di Kota Padang, Senin (25/10) kemarin. Penghargaan ini diberikan, setelah diselenggarakannya rangkaian Raker-nas Akuntansi dan Pelaporan Keuang-an Pemerintah Tahun 2020 pada tanggal 16 Agustus hingga 14 September 2021 lalu.

Walikota Payakumbuh Riza Falepi, saat diwawancara di balaikota, Selasa (26/10), mengatakan, Kota Payakumbuh termasuk daerah yang cepat dalam menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) nya kepada BPK. Disamping itu, penghargaan dalam pengelolaan keuangan daerah WTP ini, sudah diraih Kota Payakumbuh selama 7 tahun berturut-turut.

"Penghargaan ini adalah sebagai wujud apresiasi atas capaian kinerja pengelolaan keuangan Pemko Payakumbuh, sehingga mendapat plakat penghargaan. Kami berharap, pemberian penghargaan ini dapat memotivasi seluruh OPD dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah menjadi lebih baik lagi kedepannya," ujar Riza.

Ditambahkannya, tidak mudah menjalankan proses kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dengan akuntabel dan bebas korupsi. Karena butuh komitmen kuat kepala daerah dan jajaran untuk mewujudkannya.

Riza menyebutnya kerja maksimal dalam mengelola duit rakyat.

"Ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan mengingat semakin ketatnya standar pengawasan dan audit yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik. Untuk itu, terimakasih kepada seluruh elemen. Baik jajaran birokrasi, DPRD, serta seluruh masyarakat Payakumbuh. Sebab, hanya dengan komitmen tinggi serta semangat kebersamaan, penghargaan prestisius tersebut dapat diraih," tambah orang nomor satu di Payakumbuh itu.

Sementara itu, Kepala BKD Kota Payakumbuh Syafwal alias Abak, didampingi Inspektur Andri Narwan, mengatakan, Opini BPK atas LKPD merupakan salah satu kriteria utama dalam perhitungan Dana Insentif Daerah (DID). Pencapaian opini dari BPK tidak serta merta akan mendapat DID, namun menjadi modal besar selain penetapan Perda APBD yang tepat waktu, penggunaan e-budgeting dan e-procurement serta persyaratan lainnya.

"Pemko Payakumbuh sudah menerapkan sistem yang berbasis dan terintegrasi teknologi IT. Sistem ini diterapkan, agar pengelolaan keuangan daerah dapat terkontrol dengan baik dan tentunya hal ini untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran. Dengan aplikasi ini semuanya bisa terkontrol dengan baik," ucap Abak. (adv)